

## **ANALISIS PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS**

**Ari Kusumah Wardani<sup>1</sup>, Slamet Riyadi<sup>2</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2</sup>*

E-mail: [ari.kusumah@mail.ugm.ac.id](mailto:ari.kusumah@mail.ugm.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Era desentralisasi saat ini telah menjadikan Pemerintah Daerah berpusat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi sampai kepada pelayanan dasar. Namun permasalahan muncul, dimana masih banyak masyarakat perdesaan yang tergolong pra sejahtera. Selain itu, kualitas dari SDM masyarakat perdesaan yang secara kompetensi belum seluruhnya mempunyai tingkat kompetensi yang berdaya saing. Inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa sebagai motor dari pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Potensi sumber daya yang ada di perdesaan didominasi oleh kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa potensi wisata yang berada di wilayah perdesaan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Kapasitas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya, hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal tersebut menjadi urgensi agar penelitian tentang penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah perdesaan, khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata, khususnya wisata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perdesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa cukup berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang mengusung konsep Community Based Tourism (CBT) dan Smart Tourism yang ditandai dengan banyaknya sosial media yang mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.*

**Kata Kunci:** *Pemerintah Desa, Wisata Budaya, Kearifan Lokal, Smart Tourism, Pendapatan Asli Desa*

## PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya menjadi pusat perhatian khusus saat ini dari Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan sampai tingkatan masyarakat akar rumput (*grass roots*).

Percepatan pembangunan yang harus segera dilakukan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan menjadikan Pemerintah Desa harus berpikir lebih kreatif untuk menggali potensi yang ada di perdesaan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Segala sumber daya yang ada di perdesaan menjadi peluang agar, masyarakat lebih berdaya dengan adanya dukungan dari Pemerintah Desa sebagai penyelenggara dari Pemerintahan Desa. Di Kabupaten Ciamis, hanya sedikit Pemerintah Desa yang melakukan inovasi ekonomi khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumber ekonomi kerakyatan yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Ciamis tergolong mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2013 mencapai 73,32% dan di tahun 2014 mencapai 74,42% (Pusdalibang Jabar,

2014). Walaupun demikian masyarakat prasejahtera masih terdapat di wilayah Kabupaten Ciamis. Salah satu yang menjadi acuan untuk peningkatan dari kesejahteraan masyarakat, dapat dimulai dari masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih maju dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Desa harus dapat menggali potensi ekonomi, salah satunya bidang Pariwisata. Desa sangat kental sekali berkaitan dengan budaya lokal yang secara turun temurun diturunkan oleh nenek moyang. Nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat perdesaan tentunya berkaitan erat dengan tatanan atau struktur dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan norma yang ada. Namun di era modern saat ini ternyata menimbulkan degradasi nilai yang berkembang di masyarakat perdesaan.

Etika dan kesopanan mulai mengalami pergeseran dan menimbulkan sebuah celah kerusakan akhlak. Seni budaya tradisional mulai ditinggalkan dan yang paling ditakutkan hanya menjadi bagian dari cerita sejarah sebagai masyarakat yang mempunyai pluralisme budaya yang ada di perdesaan.

Modernisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran nilai dan memudarnya ketertarikan masyarakat perdesaan pada seni budaya tradisional. Seni budaya yang masih

tetap lestari tentunya harus diberi perhatian khusus oleh Pemerintah Desa agar kesenian dan budaya para leluhur tidak memudar oleh kemajuan, serta perkembangan modernisasi di segala bidang. Arah dan kebijakan dari Pemerintah Desa seharusnya dapat melindungi dan melestarikan warisan budaya tersebut.

Tetapi kapasitas dari Pemerintah Desa belum sampai pada upaya pelestarian warisan budaya dan menjadikan hal tersebut aset paling berharga yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah Desa saat ini masih terfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan administrasi sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut tentunya kurang sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 4 bagian (c) berkaitan dengan tujuan dari pengaturan Desa, yakni: melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

Perekonomian berbasis kemasyarakatan dan wisata budaya menjadi salah satu modal sosial yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pemerintah Desa**

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak lepas dari peran sumber daya manusia sebagai subjek dalam menjalankan roda pemerintahan tertentu. Tidak berbeda dengan

Pemerintahan Desa, maka yang menjadi pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada Pemerintah Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini Pemerintah Desa berpusat pada kepemimpinan dari seorang Kepala Desa. Kepala Desa yang inovatif tentunya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bukan hanya kreatifitas tetapi diperlukan juga jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam memimpin masyarakatnya dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Desa.

Menurut Peter F. Drucker (dalam Yusuf, S, 2014:5) menyatakan, bahwa Kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Hal tersebut tentunya memerlukan daya kreatifitas dan imajinasi dalam menciptakan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Program-program Pemerintah Desa yang berasal dari gagasan hasil musyawarah dengan perangkat desa lain, pelibatan tokoh masyarakat dan masyarakat desa, serta dijumpai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berkelanjutan dan terukur. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (dalam Ulumiyah, Ita. Dkk, 2013) suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas;
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin;
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut;
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
- f. Suatu program pembangunan tidak berdiri; dan
- g. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa seharusnya dapat seefektif mungkin dalam melaksanakan program tersebut. Program yang diberikan kepada masyarakat haruslah bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat.

Kesejahteraan masyarakat perdesaan menjadi tujuan akhir untuk melakukan pencapaian pemerataan pembangunan.

## 2. Pariwisata

Industrialisasi pariwisata telah gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat hingga ke tatanan pemerintahan yang berada di wilayah akar rumput. Pariwisata menjadi primadona dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan. Pembangunan pariwisata tentunya harus merujuk kepada pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Theobald

(dalam Utama, I Gusti B.R, 2017) menyatakan, Pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut maka industri pariwisata seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan. Konsep yang saat ini banyak dilakukan oleh para penggerak pariwisata, yaitu berkaitan dengan wisata desa.

Sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber devisa Negara yang sangat penting. Meskipun pariwisata memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan, namun di saat bersamaan ternyata kegiatan industri pariwisata juga melahirkan sejumlah dampak negatif, seperti merosotnya kualitas lingkungan hidup, tergesernya budaya lokal serta kesenjangan sosial ekonomi di antara masyarakat (Susyanti D.W, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata bukan hanya menghasilkan kontribusi yang positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Pergeseran nilai-nilai budaya lokal tentunya akan berdampak, bahkan hilangnya ciri khas masyarakat desa itu sendiri.

## 3. Wisata Budaya

Perkembangan pariwisata di Indonesia tergolong terus meningkat, dengan naiknya jumlah wisatawan yang datang dan hal tersebut meningkatkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata sebesar 4.25% (BPS, 2015).

Ini membuktikan destinasi wisata dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi bagi masyarakat. Salah satu yang sedang mengalami perkembangan, yakni wisata budaya.

Pluralisme budaya yang ada di Indonesia, menjadikan Negara ini mempunyai banyak keragaman budaya yang mempunyai nilai seni, estetika dan budaya yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata dan mendatangkan keuntungan finansial.

Daya tarik dari wisata budaya merupakan modal utama untuk mendatangkan wisatawan dan roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan adanya hal tersebut. Menurut Middleton (dalam Basiya. R dan Rozak H.A, 2012) menyatakan, daya tarik wisata budaya meliputi *history and folklore, religion and art, teater, musik, tari-tarian (dance)* dan *entertainment* lainnya, museum, peristiwa-peristiwa khusus seperti festival dan drama bersejarah (*pageants*).

Dari beberapa daya tarik wisata tersebut, maka wisata budaya bertujuan untuk mengedukasi wisatawan dengan budaya yang khas dan tidak adak kesamaan dengan budaya yang lainnya.

#### 4. *Smart Tourism*

Desa sebagai bagian dari program pemerataan pembangunan, tentunya telah berkembang ke arah yang lebih baik, baik itu dari segi pelayanan maupun dari segi lainnya. Potensi yang ada di desa selalu bermuara pada pengembangan destinasi wisata maupun desa wisata. Salah satunya dalam bentuk kemitraan secara sosial.

Menurut Prafitri G.R dan Damayanti M (2016) menyatakan Pengelolaan Desa Wisata tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari desa wisata itu sendiri. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Desa dengan mitra eksternal dan tentunya tetap melibatkan masyarakat di dalamnya.

Aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai ke objek wisata juga menjadi faktor penentu tingkat kedatangan para wisatawan dan didukung oleh ketersediaan akomodasi.

Menurut Rahajeng, Anggi (2008) menyatakan, faktor pertama adalah ketersediaan akomodasi meliputi tempat-tempat pelayanan umum, hotel, penginapan, serta sarana akomodasi lainnya. Ini tidak terlepas dari peran semua pihak untuk menjadikan destinasi wisata lebih diminati oleh masyarakat.

Salah satu cara, yakni dengan melakukan promosi wisata. Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Kirom N.R. Dkk, 2016) menyatakan promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Tetapi dalam konteks pariwisata merujuk pada menarik wisatawan untuk berkunjung.

Salah satu konsep yang menjunjung tinggi akan keberlanjutan sebuah pembangunan, yaitu *smart tourism*. Menurut Buhalis dan Amaranggana (dalam Santoso D.A. Dkk, 2019:17) menyatakan, *Smart tourism* atau *smart destination* memungkinkan sebuah wilayah (baik kota maupun desa) mengoptimalkan penggunaan data, kontrol dan koordinasi, dan teknologi informasi (protokol, proses, dan infrastruktur) dalam menciptakan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan tidak hanya penduduk lokal tetapi juga wisatawan dalam upaya mendukung mobilitas.

Adapun yang menjadi trend fenomena di bidang pariwisata, yakni banyaknya objek wisata berbasis *Community Based Tourism*. Beberapa

wilayah masih ada yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga masih ada di wilayah perdesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya daerah yang kental dengan nuansa Sunda, baik itu dari segi bahasa, pakaian, bahkan bentuk rumah. Inilah yang menjadi dasar atau modal sosial (Nursetiawan, I., & Garis, R. R., 2019). Inilah salah satu ciri dari pengembangan pariwisata yang sedang populer.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosial. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Chariri, A, 2009) menyatakan, Penelitian sosial, termasuk ekonomi, manajemen dan akuntansi merupakan proses pencarian pengetahuan yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan teori baru dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu ekonomi, manajemen dan akuntansi. Fokus kajian dalam penelitian ini, terfokus pada peran dari Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi wisata budaya ada di Kabupaten Ciamis. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang berasal dari informan dan sumber data sekunder dari dokumentasi dan catatan lapangan. Untuk lokasi penelitian yang akan dilakukan, yang berada di Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat. Indikator pencapaian dalam penelitian ini, yakni adanya solusi cerdas dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengembangan obyek wisata budaya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa hanya berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi

pariwisata yang ada di perdesaan. Salah satu desa yang mempunyai potensi wisata budaya, yakni Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Desa hanya dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang sebagian kelompok masyarakatnya termasuk ke dalam masyarakat adat. Terdapat sebuah perkampungan yang dinamai Kampung Adat Kuta yang mempunyai keunikan dari segi tradisi dan bentuk rumah yang masih bertahan dengan desain rumah tempo dulu. Di desa tersebut tersebut terdapat hutan keramat dan kesenian, seperti: Gondang Buhun. Wilayah kampung adat dikelola oleh Komunitas Budaya Kampung Adat Kuta dengan anggota berasal dari masyarakat asli Kampung Kuta. Adapun keadaan Kampung Adat Kuta dapat dilihat, sebagai berikut :



**Gambar.1 Ketua Adat Kampung Kuta**  
Sumber: Dok. Pribadi, 2020.

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak lepas dari peran sumber daya manusia sebagai subjek dalam menjalankan roda pemerintahan tertentu. Tidak berbeda dengan Pemerintahan Desa, maka yang menjadi pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (3)

menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa berpusat pada kepemimpinan dari seorang Kepala Desa. Kepala Desa yang inovatif tentunya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kreatifitas tetapi diperlukan juga jiwa *entrepreneurship* atau kewirausahaan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam memimpin masyarakatnya dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Desa.

### KESIMPULAN

Pengelolaan Desa Wisata tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari desa wisata itu sendiri. Sehingga peran dari Pemerintah Desa hanya sebagai fasilitator dan katalis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dari potensi budaya yang ada di perdesaan.

Artinya hal tersebut harus diperkuat dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola, menjalankan, mengimplementasikan sampai dengan mengevaluasi potensi pariwisata dari atraksi wisata budaya di suatu daerah, Aksesibilitas dan infrastruktur penunjang juga harus diperhatikan oleh semua para *stakeholder*.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2015) Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PDB 2015. [Online] Tersedia: <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/05/18/1329/proporsikontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2015.html> [12 Agustus 2019].

Chariri. A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. [Online] Tersedia: <http://eprints.undip.ac.id/577/> [12 Agustus 2019].

Kirom N.R. Dkk. (2016). *Faktor-faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Wisatawan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan.1.(3).536-546.

Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2019). *Identifikasi Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ciamis Berbasis Community Based Tourism*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 339-349.

Prafitri G.R dan Damayanti M. (2016). *Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas*. Jurnal Pembangunan Kota (JPK).4.(1).76-86.

Pusdalisbang Jabar. (2014). Angka IPM tahun 2010-2014. [Online] Tersedia: <http://www.pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/indikator/makro-7.html> [12 Agustus 2019].

Rahajeng, Anggi. (2008). *Analisis Faktor Keputusan Wisata Budaya, Sejarah dan Alam Yogyakarta: Persepsi Wisatawan Domestik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.13.(1).33-49.

Susyanti D.W. (2014). *Potensi Desa Melalui Potensi Pariwisata Pedesaan*. *Epigram: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Humaniora*.11.(1).65-70.

Ulumiyah, Ita. Dkk. (2013). *Peran Pemerintah Desa dalam*

*Memberdayakan Masyarakat Desa  
(Studi pada Desa Sumberpasir  
Kecamatan Pakis Kabupaten  
Malang).*

Yusuf, Syahrial. (2014). *Entrepreneurship:  
Teori dan Praktik Kewirausahaan  
yang Telah Terbukti. Jakarta:  
Lentera Ilmu Cendekia. Jurnal  
Administrasi Publik  
(JAP).1.(5).890-899.*

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014  
tentang Desa

Utama, I Gusti B.R. (2017). Pemasaran  
Pariwisata. Yogyakarta: CV. Andi  
Offset.